

**PENGARUH BELANJA KEGIATAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH**

Lilis Karnita Soleha

ABSTRAK

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang tangguh, diperlukan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD antara lain peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Hasil yang diperoleh adalah Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Cimahi. Hal ini didukung oleh uji statistik, dimana $r = 0,847$ menunjukkan adanya korelasi linier antar variabel. Koefisien Determinasinya 71,8 % mengindikasikan bahwa pengaruh X terhadap Y kuat, dimana 71,8 % variasi nilai PAD di Kota Cimahi disebabkan oleh karena adanya perbedaan dalam nilai Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD di Kota Cimahi, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD terhadap PAD di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikeluarkan maka semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima.

Keyword : Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan PAD

1. LatarBelakang

Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu negara yang diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan kepentingan negara. Maka dari itu pemerintahan di suatu negara memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sebab pemerintahan merupakan salah satu perantara aspirasi rakyat yang harus mampu mengelola dan menjalankan tugasnya dengan baik, salah satunya untuk menciptakan pembangunan nasional secara optimal dan merata. Pembangunan nasional tidak hanya mencakup di pemerintahan pusat saja, tetapi juga harus merata sampai ke tingkat daerah. Karena dengan pembangunan daerah yang lebih baik maka akan mendatangkan atau menghasilkan pendapatan yang lebih baik pula bagi pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara baik, bersih, dan bertanggungjawab. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah daerah harus mengedepankan beberapa aspek antara lain adanya transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai daerah otonom, pemerintah mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyarankan bahwa wilayah daerah merupakan daerah otonom yang harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur, mengelola, dan membiayai rumah tangganya sendiri di daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dan otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pusat. Tujuan otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (Yowono, 2005:50).

Dengan adanya otonomi daerah ini maka pemerintah daerah dituntut untuk berusaha agar menggali potensi yang dimiliki daerahnya sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Besar kecilnya pendapatan daerah sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan di daerah tersebut, karena dengan otonomi daerah pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi tergantung pada kemampuan daerah tersebut untuk menggali sumber daya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Bumi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Pendapatan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Horasman pada tahun 2003, penerimaan daerah yang paling dominan di Kota Cimahi bersumber dari dana perimbangan (dana dari Pemerintah Pusat). Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki peran yang relative kecil dalam struktur keuangan daerah, sehingga masih bergantung terhadap transfer dari Pemerintahan pusat. Hal senada dikatakan oleh Lestari (2005), bahwa Kota Cimahi masih ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, hal ini terbukti dengan kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi dan besarnya penerimaan dari dana perimbangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pemerintah Kota Cimahi dominannya bersumber dari Pemerintah Pusat.

Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 1
Struktur Pendapatan Kota Cimahi Tahun 2002 – 2011

TAHUN	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)
2002	1. PAD	25.750.017.455
	2. Dana Perimbangan	114.619.968.850
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	11.389.808.000
	Jumlah	151.759.794.305
2003	1. PAD	29.488.458.866
	2. Dana Perimbangan	180.327.023.000
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	15.025.000.000
	Jumlah	224.840.481.866
2004	1. PAD	41.152.294.199
	2. Dana Perimbangan	202.182.417.537
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	9.999.751.000
	Jumlah	253.334.462.736
2005	1. PAD	48.242.903.314
	2. Dana Perimbangan	210.917.229.975
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	15.950.000.000
	Jumlah	275.110.113.289
2006	1. PAD	51.646.055.859
	2. Dana Perimbangan	308.779.317.345
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	18.051.000.000
	Jumlah	378.476.373.204
2007	1. PAD	55.813.859.454
	2. Dana Perimbangan	333.948.767.156
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	55.939.260.728
	Jumlah	445.701.887.338
2008	1. PAD	65.108.137.872
	2. Dana Perimbangan	385.339.766.618
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	51.431.328.523
	Jumlah	501.879.233.013
2009	1. PAD	74.383.053.802
	2. Dana Perimbangan	415.077.394.467
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	49.025.642.427
	Jumlah	538.486.090.696
2010	1. PAD	87.321.034.057
	2. Dana Perimbangan	432.570.291.521
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	99.597.512.151
	Jumlah	619.488.837.729
2011	1. PAD	117.928.288.161
	2. Dana Perimbangan	422.164.126.956
	3. Lain-lain Pendapatan yang sah	182.904.861.668
	Jumlah	722.997.276.785

Berikut struktur Pendapatan Kota Cimahi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi :

Tabel 2
Kontribusi PAD Kota Cimahi
Tahun 2002 – 2011

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	JUMLAH PAD	KONTRIBUSI PAD
2002	150.115.532.850	25.750.017.455	17,15%
2003	256.573.107.200	29.488.458.866	11,49%
2004	245.356.565.068	41.152.294.199	16,77%
2005	270.227.010.447	48.242.903.314	17,85%
2006	378.752.271.569	51.646.055.859	13,64%
2007	445.701.887.338	55.813.859.454	12,52%
2008	501.879.233.013	65.108.137.872	12,97%
2009	538.486.090.696	74.383.053.802	13,81%
2010	619.488.837.729	87.321.034.057	14,10%
2011	722.997.276.785	117.928.288.161	16,31%

Sumber :DinasPendapatan Daerah Kota Cimahi (diolah)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi berkontribusi kecil terhadap Total Pendapatan Kota Cimahi jika kita bandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah, artinya pembiayaan kegiatan Kota Cimahi masih bergantung pada bantuan pusat. Hal tersebut tentu saja berdampak negative terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Cimahi, seperti tersendatnya belanja kegiatan disetiap SKPD serta tersendatnya kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Cimahi sampai saat ini masih mendapatkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, pada Dana Perimbangan yang seharusnya membiayai kegiatan-kegiatan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sebagian dari itu dialokasikan untuk membantu kelancaran kegiatan belanja daerah. Sesuai dengan yang diungkap oleh E. Koswara dalam Abdul Halim (2004:35) bahwa :

“Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai masyarakat sistem pemerintahan negara.”

Dari pernyataan diatas berbanding terbalik dengan keadaan di Pemerintah Kota Cimahi yang pada saat ini masih mendapat kebijakan dari pemerintah pusat berupa bantuan dalam bentuk pengalokasian sebagian dari Dana Perimbangan dengan jumlah yang begitu besar dan dinilai menjadi

sebuah ketergantungan. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi harus berupaya lebih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya dapat ditempuh melalui beberapa upaya, salah satu diantaranya yaitu dengan cara Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu upaya memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat dan teliti melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka diadakan alokasi dana untuk kelancaran kegiatan tersebut. Untuk mendukung tujuan tersebut Pemerintah Kota Cimahi mengaplikasikannya kepada beberapa program dan Kegiatan Intensifikasi Pendapatan diantaranya :

1. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. Peningkatan Penerimaan PBB;
3. Peningkatan Administasi Pelayanan Pajak Daerah;
4. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah;
5. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan;
7. Pengawasan Penerimaan PAD.

Hal ini tentu saja sangat mendukung, karena dengan adanya kegiatan intensifikasi yang berjalan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan Pemerintah Kota Cimahi dapat mensejahterakan kehidupan rakyat.

2. Kerangka Berfikir

Di era otonomi daerah yang dimulai digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat diperlukan dukungan anggaran yang memadai, yang salah satunya harus dipenuhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang tangguh, maka diperlukan pula usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD antara lain peningkatan cakupan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu : (1) menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi, (2) meningkatkan besarnya penetapan, (3) mengurangi tunggakan.

Variabel yang paling mungkin dilakukan pengujian korelasional dengan PAD adalah variabel intensifikasi PAD, dengan alasan Intensifikasi PAD mempunyai jenis data yang sama dengan PAD, yaitu kuantitatif dan skala *construct* yang sama dengan PAD, yaitu skala rasio. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis memilih Intensifikasi PAD sebagai variabel Independen (X) yang akan diuji derajat korelasionalnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Belanja kegiatan Intensifikasi PAD (X)	Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penurunan kas pemerintah untuk pembayaran suatu tindakan atau usaha-usaha (pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti) dengan tujuan memperbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Besarnya belanja kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 s/d tahun 2011	R A S I O
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 s/d tahun 2011	R A S I O

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Jumlah Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi

Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Upaya ini tidak dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Tabel 4.
Realisasi Belanja Kegiatan Intensifikasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2002-2011

	Realisasi Belanja Kegiatan Intensifikasi	Prosentase (%) Bertambah / (Berkurang)	Realisasi PAD	Prosentase (%) Bertambah / (Berkurang)
2002	97.000.000	-	25.750.017.455	Tahun
2003	98.000.000	1,03	29.488.458.866	14,52
2004	100.000.000	2,04	41.152.294.199	39,55
2005	110.000.000	10	48.242.903.314	17,23
2006	125.000.000	13,64	51.646.055.859	7,05
2007	128.000.000	2,40	55.813.859.454	8,07
2008	130.000.000	1,56	65.108.137.872	16,65
2009	494.000.000	280	74.383.053.802	14,25
2010	704.041.208	42,52	87.321.034.057	17,39
2011	589.707.980	(16,24)	117.928.288.161	35,05

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi (diolah)

Berdasarkan tabel 4. diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami peningkatan, rata-rata sebesar Rp. 59.683.410.304,- atau sebesar 106,78%, hal ini tidak lepas dari peranan belanja kegiatan intensifikasi. Dengan adanya biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam belanja kegiatan intensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Sedangkan untuk jumlah belanja kegiatan intensifikasi, peningkatan pada Tahun 2002 sampai dengan 2010 dengan capaian rata-rata sebesar Rp. 220.671.245,- atau sebesar 44,15%, dan pada Tahun 2011 jumlah belanja kegiatan intensifikasi terjadi penurunan sebesar Rp. 114.333.228,- atau sebesar 16,24%, hal tersebut dapat disebabkan adanya efisiensi belanja daerah dalam hal ini belanja kegiatan intensifikasi PAD.

4.2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Di Indonesia permasalahan rendahnya PAD seolah menjadi permasalahan klasik di setiap daerah, oleh karena itu tidak ada satupun Pemerintah Daerah yang benar-benar sanggup membiayai daerahnya sendiri tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang lingkup sumber PAD yang diberikan Pemerintah Pusat.

Selain itu usaha-usaha lain dalam meningkatkan PAD juga penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik usaha secara langsung seperti memperbaiki sistem pemungutan PAD dengan cara intensifikasi PAD, maupun usaha tidak langsung seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi
Tahun 2002 – 2011

No	Tahun	Target (T) Penerimaan PAD (Rp.)	Realisasi(R) Penerimaan PAD (Rp.)	R/T (%)	Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD	
					Jumlah (Rp.)	%
1	2002	24.105.756.000	25.750.017.455	106,82	-	-
2	2003	27.186.553.500	29.488.458.866	108,47	3.738.441.411	14,52
3	2004	33.176.396.531	41.152.294.199	124,04	11.663.835.332	39,55
4	2005	43.359.780.472	48.242.903.314	111,26	7.090.609.115	17,23
5	2006	51.565.020.920	51.646.055.859	100,16	3.403.152.546	7,05
6	2007	56.033.235.423	55.813.859.454	99,61	4.167.803.595	8,07
7	2008	62.154.346.389	65.108.137.872	104,75	9.294.278.418	16,65
8	2009	76.278.639.222	74.383.053.802	97,51	9.274.915.930	14,25
9	2010	81.594.254.429	87.321.034.057	107,02	12.937.980.255	17,39
10	2011	109.060.351.699	117.928.288.161	108,13	30.607.254.104	35,05
Rata-rata		56.451.433.459	59.683.410.304	106,78	9.217.827.071	16,98

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Cimahi (diolah)

Selanjutnya dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa terdapat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, namun demikian besarnya kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Dari tabel 5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada yang tidak mencapai target diantaranya tahun 2007 dan 2009, Artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya belum tentu mencapai maksimum dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3. Besar Pengaruh Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Belanja kegiatan intensifikasi seperti yang telah di uraikan pada kajian teori, merupakan penurunan kas pemerintah untuk pembayaran suatu tindakan atau usaha-usaha (pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti) dengan tujuan untuk memperbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori tersebut, kita akan melihat data yang telah di dapat pada penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, seberapa besar pengaruh belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

Tabel 6.
 Besar Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD dan
 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Besar Kegiatan Intensifikasi PAD (Rp.) (X)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.) (Y)
2002	97.000.000	25.750.017.455
2003	98.000.000	29.488.458.866
2004	100.000.000	41.152.294.199
2005	110.000.000	48.242.903.314
2006	125.000.000	51.646.055.859
2007	128.000.000	55.813.859.454
2008	130.000.000	65.108.137.872
2009	494.000.000	74.383.053.802
2010	704.041.208	87.321.034.057
2011	589.707.980	117.928.288.161

Berdasarkan Tabel 6. belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi tidak pernah tetap, besarnya selalu bervariasi. Peningkatan belanja kegiatan intensifikasi PAD diimbangi dengan meningkatnya penerimaan PAD di Kota Cimahi. Dilihat dari data tersebut, ada pengaruh belanja kegiatan intensifikasi PAD terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi.

4.4. Analisis Korelasi

Dalam penelitian yang penulis lakukan, hanya akan menguji hubungan X dan Y dengan analisis korelasi saja. Karena penelitian ini termasuk dalam sensus, dimana tidak perlu diadakannya uji hipotesis.

Berdasarkan tabel 6. kita dapat melakukan analisis korelasi, kemudian untuk mempermudah mengidentifikasi, kita konversi data dari tabel tersebut ke dalam tabel di bawah ini, selanjutnya dihitung nilai X^2 , Y^2 , dan XY nya. Setelah dihitung di masing-masing kolom, nilai X^2 , Y^2 , dan XY selanjutnya dijumlahkan dan hasil penjumlahannya disimpan di kolom akhir. Maka untuk lebih jelas perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel 7.
 Tabel Pembantu Penghitungan Uji Statistik
 Antara Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD dengan PAD di Kota Cimahi
 Tahun 2002 – 2011

Tahun	X	Y	X^2	Y^2	XY
2002	97.000.000	25.750.017.455	9.409.000.000.000.000	663.063.398.932.805.000.000	2.497.751.693.135.000.000
2003	98.000.000	29.488.458.866	9.604.000.000.000.000	869.569.206.318.313.000.000	2.889.868.968.868.000.000
2004	100.000.000	41.152.294.199	10.000.000.000.000.000	1.693.511.317.811.420.000.000	4.115.229.419.900.000.000
2005	110.000.000	48.242.903.314	12.100.000.000.000.000	2.327.377.720.115.710.000.000	5.306.719.364.540.000.000
2006	125.000.000	51.646.055.859	15.625.000.000.000.000	2.667.315.085.790.950.000.000	6.455.756.982.375.000.000
2007	128.000.000	55.813.859.454	16.384.000.000.000.000	3.115.186.907.150.870.000.000	7.144.174.010.112.000.000
2008	130.000.000	65.108.137.872	16.900.000.000.000.000	4.239.069.617.159.360.000.000	8.464.057.923.360.000.000
2009	494.428.030	74.383.053.802	244.036.000.000.000.000	5.532.838.692.911.200.000.000	36.745.228.578.188.000.000
2010	704.041.208	87.321.034.057	495.674.022.562.099.000	7.624.962.988.783.750.000.000	61.477.606.301.299.400.000
2011	589.707.980	117.928.288.161	347.755.501.675.680.000	13.907.081.148.583.900.000.000	69.543.252.596.281.200.000
Σ	2.575.749.188	596.834.103.039	1.177.487.524.237.780.000	42.639.976.083.609.600.000.000	204.639.645.838.059.000.000
Σ^2	6.634.483.879.482.660.000	356.210.946.550.368.000.000.000			

Sumber : Dinas Pendapaan Kota Cimahi (diolah)

Keterangan :

- X : Belanja Kegiatan Intensifikasi
- Y : Pendapatan Asli Daeah (PAD)

Selanjutnya akan dihitung korelasi dari data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh maka kita dapat menentukan korelasi dengan menggunakan rumus :

$$r = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Berdasarkan pada tabel 7. kita telah peroleh data perhitungan yang dibutuhkan untuk menjawab rumus korelasi di atas, dan selanjutnya di substitusikan data perhitungan tersebut ke dalam rumusnya, dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan pada tabel 7. kita telah peroleh data perhitungan yang dibutuhkan untuk menjawab rumus korelasi di atas, dan

selanjutnya di substitusikan data perhitungan tersebut ke dalam rumusnya, dan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$r = \frac{10204639645838059000000 - (2.575749188)(569834103039)}{\sqrt{\{101.177487524237780000 - (6.634483879482660000)\} \{1042639976083609600000000 - (356210946550368000000000)\}}}$$

$$= \frac{(2.046396458380590000000) - (1.557294956273410000000)}{\sqrt{(5.140391362895130000) - (70.188814285728300000000)}}$$

$$= \frac{509101502107174000000}{\sqrt{360797974726280 \times 10^{15}}}$$

$$= \frac{509101502107174000000}{600664610848856000000}$$

$$= 0,847$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Koefisien Korelasi sebesar 0,847 yang menunjukkan bahwa antara variabel X dan variabel Y terdapat hubungan yang sangat kuat (berdasarkan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi).

Setelah diketahui besarnya Koefisien Korelasi, maka dapat dihitung Koefisien Determinasi yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (Belanja Intensifikasi PAD) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Menurut Sudjana (1997:246) rumus Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Berdasarkan kepada rumus tersebut, maka selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai r (korelasi) yang telah kita hitung sebelumnya ke dalam rumus. Perhitungan Koefisien Determinasinya adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,847)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 71,8\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh Kd sebesar 71,8%, artinya variabel X (Belanja Intensifikasi PAD) mempunyai pengaruh yang "Kuat" terhadap variabel Y (PAD) pada DISPENDA Kota Cimahi sebesar 71,8%, sedangkan sisanya sebesar 28, 2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2011 mengalami penurunan anggaran belanja pada kegiatan intensifikasi, namun demikian peningkatan belanja kegiatan intensifikasi tersebut diimbangi dengan naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi, besar persentase (%) kenaikan belanja intensifikasi PAD terbesar terdapat pada tahun 2009-2010, yaitu sebesar 29,83%, dan besar belanja intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 704.041.208,00
2. Besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus mengalami

kenaikan, besar persentase (%) kenaikan penerimaan PAD terbesar terdapat pada tahun 2010-2011, yaitu sebesar 25,95 %, dan besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 117.928.288.161.

3. Belanja Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Cimahi. Hal ini didukung oleh uji statistik, dimana $r = 0,847$ menunjukkan adanya korelasi linier antar variabel. Koefisien Determinasinya 71,8 % mengindikasikan bahwa pengaruh X terhadap Y kuat, dimana 71,8 % variasi nilai PAD di Kota Cimahi disebabkan oleh karena adanya perbedaan dalam nilai Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD di Kota Cimahi, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Belanja Kegiatan Intensifikasi PAD terhadap PAD di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikeluarkan maka semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kiranya dapat diajukan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Kota Cimahi. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota No. 973/Kep. 28B-Dispenda/2002 mengenai kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi, maka Dinas Pendapatan Kota Cimahi harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan tersebut dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dari penelitian diperoleh hubungan yang sangat kuat antara belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal ini harus tetap dipertahankan dengan cara melakukan kontrol terhadap belanja kegiatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hal tersebut dapat menunjang besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi dan diharapkan semua itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.